KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Usulan Rp 7,2 Triliun Hanya Berorientasi Proyek : Anggaran DPR Tak Layak Dinaikkan
Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 9

Usulan Rp 7,2 Triliun Hanya Berorientasi Proyek

Anggaran DPR Tak Layak Dinaikkan

[JAKARTA] Langkah DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengajukan anggaran Rp 7,2 triliun untuk 2018 dinilai hanya berorientasi proyek dan tidak berbasis kinerja.

"Perencanaan Anggaran DPR ini tidak berbasis Kinerja, kebutuhan sesungguhnya hanya Rp 4 triliun, dengan anggaran itu pun, kinerja DPR masih mengecewakan, tidak sesuai idealisme rakyat. Fungsi legislasi minim, fungsi anggaran masih sering disalahgunakan mafia anggaran, fungsi pengawasan justru untuk menyerang KPK. Saya rasa DPR tidak layak menaikkan anggaran," ujar Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi di Jakarta, Jumat (11/8).

Dijelaskan, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 dilayangkan saat rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. RKA diserahkan ke pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin paripurna menanyakan persetujuan anggota DPR.

Anggaran sebesar Rp 7,2 triliun itu yakni untuk Anggaran Satuan kerja (Satker) DPR Rp 4,87 triliun dan anggaran Satker Setjen DPR senilai Rp 2,37 triliun. Ternyata, kata Apung, alokasi Rp 7,2 triliun belum jelas, dioreientasikan untuk pembangunan gedung baru dan apartemen.

"Bau proyek gedung baru dan apartemen bangkit lagi dalam usulan Rp 7,2 triliun ini. Orientasi jelas pada proyek, bukan pada peningkatan kinerja DPR. Sangat disayangkan, mereka tidak menghormati rakyat sebagai konstituen dan pembayar pajak dengan menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Kami menolak RKA ini," kata dia.



Rincian anggaran Rp 7,2 triliun yang diajukan DPR untuk tahun 2018:

Anggaran Satuan kerja (Satker) Dewan	**: Rp 4.870.544.977.000**
1. Program pelaksanaan fungsi DPR	: Rp 1.158.260.928.000
2. Program penguatan kelembagaan DPR	: Rp 3.712.284.039.000
Anggaran Satuan kerja (Satker) Setjen	**: Rp 2.375.971.321.000**
1. Program Manajemen Pelaksana Teknis Lain Setjen DPR	: Rp 2.324.869.870.000
2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	: Rp 51.101.451.000

Foto: ISTIMEWA

Sementara itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, DPR mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 5,7 triliun atau 25% pada 2018 mendatang. Anggaran DPR tahun ini hanya mencapai Rp 4,26 triliun.

"Anggaran itu untuk satuan kerja dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR," ujar Anton, Kamis (10/8).

Politisi Golkar itu menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,34% dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," katanya.

Menurut Anton, usulan kenaikan anggaran DPR tahun 2018 akan dibahas setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus 2017. Nota keuangan itu akan kembali dibawa di Badan Anggaran DPR. "Nanti baru 16 Agustus nota keuangan disampaikan Presiden. Setelah itu baru kita bahas lagi," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kenaikan anggaran DPR pada 2018 adalah wajar. Anggaran DPR saat ini yang paling kecil ketimbang lembaga-lembaga lainnya. "Hanya sekitar 0,34% dari total APBN. Saya kira wajar," kata Fadli.

Bahkan, ia berharap DPR bisa mengelola anggarannya sendiri. Hal itu dinilai penting agar DPR bisa melakukan perbaikan ruangan anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf.

Fadli menyebutkan, adanya penambahan tenaga ahli hingga staf administrasi membuat ruangan kerja anggota dewan menjadi semakin sempit. Wacana lainnya adalah pemindahan perumahan anggota dewan dari tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata ke tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, kenaikan anggaran 2018 untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen. Anggota DPR nantinya tak perlu tinggal jauh dari Kompleks Parlemen sehingga tak membutuhkan kendaraan. [N-8/H-14]